

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia saat ini sedang menyelesaikan pembangunan yang secara maksimal dengan harapan memajukan Indonesia agar tidak kalah dengan negara lain dalam persaingan, salah satunya pada bidang keolahragaan. Pembangunan di bidang keolahragaan tersebut, merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kualitas olahraga itu sendiri (Rohani dan Anam 2022).

Olahraga di tanah air khususnya Provinsi Banten masih membutuhkan perhatian dan pembinaan khusus dalam usaha mencari bibit yang baru maupun usaha meningkatkan prestasi atlit. Olahraga adalah salah satu aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat, keberadaannya sekarang ini tidak lagi dipandang sebelah mata tetapi sudah menjadi bagian dari kegiatan masyarakat (Nofrizal et al. 2024). Olahraga adalah salah satu bentuk dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia yang diarahkan pada pembentukan watak dan kepribadian atau disiplin dan sportifitas yang tinggi serta peningkatan prestasi yang dapat meningkatkan rasa kebanggaan nasional.

Dalam memahami konteks ini, olahraga memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan integrasi sosial masyarakat (Martín-Rodríguez et al. 2024). Di samping itu, olahraga juga memiliki potensi untuk menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi, terutama melalui industri olahraga yang berkembang pesat (Li dan Huang 2024). Oleh karena itu, kebijakan olahraga yang efektif dan partisipasi pemerintah daerah yang aktif sangatlah penting dalam mendukung pengembangan olahraga di tingkat lokal. Penyelenggara pemerintah daerah di Indonesia telah mengalami transformasi. Sebelumnya pemerintah Orde Baru menganut sistem sentralisasi yang mana hubungan antara pusat dan daerah selalu terpusat dan pusat kewenangan penuh untuk mengatur segala urusan

pemerintahan (Maulani, Budiati, dan Yulianti 2022). Dimulainya era Reformasi, hubungan antara pusat dan daerah disebut dengan istilah otonomi daerah dan desentralisasi. Seperti yang termaktub dalam (UU No 32 Tahun 2004) Tentang Pemerintah Daerah.

Kebijakan olahraga di tiap negara telah menjadi fokus utama pemerintah, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat identitas nasional, dan menciptakan lingkungan yang sehat secara fisik maupun mental hal ini dinyatakan dalam Undang-undang (UU No 11 Tahun 2022) Tentang Keolahragaan. Secara operasional pengembangan kebijakan olahraga di Indonesia seharusnya berpedoman pada peraturan-peraturan-undangan, dimana perencanaan strategi yang bersifat jangka panjang terlebih dahulu dirumuskan dengan baik (Rahadian dan Ma'mun 2018). Rumusan perencanaan strategi harus bersifat komprehensif, terukur, berjangka panjang, dan berkelanjutan.

Di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten, kebijakan olahraga mendapat sorotan khusus dalam konteks pembangunan daerah. Provinsi Banten, dengan segala kekayaan budaya, sosial, dan sumber daya alamnya, dihadapkan pada tantangan yang kompleks dan dinamis dalam mengelola kegiatan olahraga yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Tidak seperti kebanyakan bidang kebijakan lainnya, kebijakan olahraga, dan khususnya kebijakan olahraga lokal, jarang menjadi sasaran analisis kritis yang ekstensif. Oleh karena itu, masih banyak yang belum diketahui mengenai fungsi sebenarnya dan perkembangan kebijakan olahraga lokal (Houlihan, 2005; Mansfield, 2016 dalam Hoekman, Elling, dan van der Poel 2022). Peran pemerintah daerah dalam pengembangan olahraga sering kali menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan potensi olahraga sebagai instrumen pembangunan.

Provinsi Banten sebagai wilayah yang tergolong muda namun strategis dalam peta pembangunan nasional, telah menunjukkan geliat dalam membangun sektor olahraga. Berbagai kompetisi ajang daerah maupun nasional telah diikuti oleh kontingen Banten, bahkan beberapa cabang

Edit Tirna, 2025

ANALISIS KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN OLAHRAGA PRESTASI : STUDI KASUS DI PROVINSI BANTEN

olahraga menunjukkan prestasi yang mengecewakan. Namun prestasi tersebut masih bersifat sporadis dan belum mencerminkan sistem pelatihan yang terencana dengan baik. Kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dengan realisasi di lapangan menjadi perhatian penting yang perlu dikaji lebih dalam, terutama mengenai efektivitas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Sebagai salah satu wilayah strategis di Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan olahraga prestasi. Hal ini terlihat dari jumlah cabang olahraga yang aktif, munculnya atlet-atlet potensial di tingkat nasional, serta dukungan infrastruktur dasar dari pemerintah daerah. Selain itu, Banten secara rutin mengikuti berbagai ajang kejuaraan nasional, termasuk Pekan Olahraga Nasional (PON). Namun, di balik potensi tersebut, pencapaian prestasi Banten secara umum masih belum optimal. Data perolehan medali pada beberapa edisi PON menunjukkan bahwa posisi Banten belum konsisten berada di papan atas, bahkan cenderung stagnan dari tahun ke tahun.

Di lapangan, masih ditemukan sejumlah persoalan mendasar. Pertama, dukungan pendanaan untuk pembinaan olahraga prestasi dinilai belum memadai dan belum merata ke seluruh cabang olahraga. Kedua, koordinasi antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Banten, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), serta cabang olahraga belum sepenuhnya terintegrasi. Ketiga, sarana dan prasarana latihan masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun kelayakan, sehingga tidak sepenuhnya mendukung pembinaan atlet secara berkelanjutan. Keempat, program identifikasi dan pembinaan bakat muda belum berjalan sistematis, serta belum didukung oleh riset dan pendekatan ilmiah yang memadai.

Kesenjangan (gap) juga tampak jelas antara kebijakan yang tertuang dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan dengan implementasi di lapangan. Misalnya, kebijakan menargetkan peningkatan perolehan medali dan partisipasi atlet, namun realisasi dukungan dana, peningkatan kualitas pelatih, dan penyediaan fasilitas belum sejalan

Edit Tirna, 2025

ANALISIS KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN OLAHRAGA PRESTASI : STUDI KASUS DI PROVINSI BANTEN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dengan target tersebut. Akibatnya, program pembinaan atlet seringkali berjalan parsial, tidak berkelanjutan, dan tidak terukur dengan jelas.

Selain itu, dukungan terhadap atlet pasca-karier masih minim. Banyak atlet Banten yang kesulitan melanjutkan jenjang pendidikan atau karier setelah masa kejayaan mereka berakhir. Di sisi lain, pelatih juga menghadapi keterbatasan dalam peningkatan kompetensi dan kesejahteraan. Padahal, keberhasilan pembinaan olahraga prestasi sangat dipengaruhi oleh kualitas pelatih, keberlanjutan kompetisi, serta dukungan jangka panjang bagi atlet.

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan adanya celah dalam tata kelola kebijakan olahraga prestasi di Provinsi Banten, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap kebijakan penyelenggaraan pembangunan olahraga prestasi sangat diperlukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan merumuskan strategi perbaikan. Melalui pendekatan penelitian kualitatif, penelitian ini berupaya menggali persepsi, pengalaman, serta implementasi kebijakan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, KONI, pelatih, atlet, anggota legislatif, dan akademisi.

Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, sikap pemerintah Provinsi Banten terus melakukan upaya dalam pembangunan olahraga ini. Hal ini ditunjukkan dari beberapa cabang olahraga seperti angkat besi, atletik, dan pencak silat telah mencatatkan prestasi yang membanggakan di tingkat nasional dan internasional. Keberhasilan ini tidak lepas dari pembinaan atlet yang terus digalakkan, baik oleh pemerintah daerah maupun klub-klub olahraga (Grix dan Carmichael 2012). Namun, distribusi prestasi masih belum merata di semua kabupaten/kota di Banten, dengan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang mendominasi perolehan medali di berbagai ajang olahraga provinsi.

Sarana dan prasarana olahraga di Banten terus ditingkatkan, meskipun masih perlu pembentahan di beberapa daerah. Beberapa fasilitas olahraga yang representatif telah dibangun, seperti stadion dan gedung olahraga. Namun, sarana dan prasarana olahraga di beberapa daerah yang kurang memadai

Edit Tirna, 2025

ANALISIS KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN OLAHRAGA PRESTASI : STUDI KASUS DI PROVINSI BANTEN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sering kali menjadi hambatan utama dalam peningkatan prestasi (Gunawan dan D 2012). Selain itu, dukungan anggaran untuk pembinaan atlet dan pengembangan olahraga juga perlu ditingkatkan agar prestasi olahraga Banten dapat lebih optimal.

Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pembangunan olahraga juga tidak dapat diabaikan. Dari perencanaan yang kurang matang hingga keterbatasan anggaran, berbagai faktor dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan olahraga dan partisipasi pemerintah daerah. Oleh karena itu, evaluasi yang cermat perlu dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan tersebut dan mencari solusi yang tepat guna meningkatkan kinerja dan kontribusi pemerintah daerah dalam pembangunan olahraga. Bagaimana implementasi kebijakan olahraga yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam mendukung pembangunan olahraga di wilayahnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan olahraga yang lebih efektif, inklusif, dan berorientasi pada prestasi jangka panjang.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam bentuk analisis kritis terhadap pelaksanaan kebijakan olahraga prestasi di daerah, serta memberikan rekomendasi praktis bagi Pemerintah Provinsi Banten dalam merancang kebijakan yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan untuk peningkatan prestasi olahraga di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik lebih jauh untuk meneliti bagaimana optimalisasi kebijakan olahraga dan partisipasi pemerintah provinsi banten dalam pembangunan olahraga, maka dalam hal ini evaluasi harus memberikan analisis retrospektif terhadap suatu proyek, program atau kebijakan untuk menilai seberapa berhasil atau tidaknya proyek tersebut dan pembelajaran apa yang dapat

Edit Tirna, 2025

ANALISIS KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN OLAHRAGA PRESTASI : STUDI KASUS DI PROVINSI BANTEN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

diambil untuk masa depan (HM Treasury 2003 dalam Chen 2018). Dengan adanya rumusan ini maka terdapat suatu permasalahan yang berhubungan dengan judul yang penulis kemukakan.

1. Bagaimana program yang diterapkan Pemerintah Provinsi Banten dalam penyelenggaraan pembangunan olahraga prestasi?
2. Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Banten dalam penyelenggaraan pembangunan olahraga prestasi?
3. Bagaimana dampak kebijakan Pemerintah Provinsi Banten dalam penyelenggaraan pembangunan olahraga prestasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka penulis fokus kepada tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendapatkan gambaran tentang program yang diterapkan Pemerintah Provinsi Banten dalam penyelenggaraan pembangunan olahraga prestasi.
2. Untuk mengetahui lebih rinci tentang implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Banten dalam penyelenggaraan pembangunan olahraga prestasi.
3. Untuk memperoleh kejelasan tentang dampak kebijakan Pemerintah Provinsi Banten dalam penyelenggaraan pembangunan olahraga prestasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, maka yang diharapkan penulis melalui penelitian ini adalah:

1. Dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan olahraga di Provinsi Banten dengan memberikan wawasan mendalam tentang implementasi kebijakan olahraga dan partisipasi pemerintah dalam pembangunan olahraga.
2. Penelitian ini akan memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di pemerintah Provinsi Banten untuk mengevaluasi kebijakan

Edit Tirna, 2025

ANALISIS KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN OLAHRAGA PRESTASI : STUDI KASUS DI PROVINSI BANTEN

yang ada dan membuat keputusan yang lebih tepat dalam upaya meningkatkan efektivitas kebijakan olahraga.

3. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti, akademisi, dan praktisi olahraga untuk melakukan penelitian lanjutan dalam bidang kebijakan olahraga dan pengembangan olahraga di tingkat daerah.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Adapun sistematika dalam penulisan penelitian ini sesuai dengan Penulisan penulisan Universitas Pendidikan Indonesia KTI 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan berisikan Latar belakang penelitian, Rumusan masalah penelitian, Tujuan penelitian, Manfaat/signifikansi penelitian, dan Struktur organisasi tesis.

BAB II : Kajian Pustaka, merupakan Landasan teori, Gambaran umum mengenai dasar teori penelitian, Penelitian relevan dan Hipotesis penelitian.

BAB III : Metode Penelitian. Berisikan Desain penelitian, Lokasi dan waktu penelitian, Partisipan, Populasi dan sampel, Instrumen penelitian, Prosedur penelitian, Definisi operasional, Program penelitian dan Analisis data.

BAB IV : Hasil penelitian. Berisikan Hasil pengolahan dan analisis data, serta Pembahasan.

BAB V : Kesimpulan, Implikasi, dan Rekomendasi. Berisikan Kesimpulan, Implikasi, dan Rekomendasi.